



Website : <http://um-expel.ac.id>

email : jusnia@um-expel.ac.id

JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora



P-ISSN: 2356 - 9033
E-ISSN: 2579 - 9398

Fakultas Hukum

Peran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya

Mohammad Rafi Syafiuddin ¹⁾, Agus Widiyarta ²⁾

Universitas Pembangunan 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

mohrafisyafiuddin16@gmail.com ¹⁾
aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id ²⁾

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek infrastruktur. Penerapan SPM di bidang pekerjaan umum diharapkan dapat menjamin kualitas dan aksesibilitas layanan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Namun, pembangunan infrastruktur di kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembebasan lahan, kemacetan lalu lintas, kinerja kontraktor yang kurang optimal, dan dampak lingkungan. Faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat, dukungan finansial, dan kebijakan pemerintah yang jelas juga berperan penting dalam keberhasilan proyek. Dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang efektif, diharapkan infrastruktur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta sosial secara berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan proyek infrastruktur memenuhi standar yang ditetapkan.

Kata kunci: Kota Surabaya, Pekerjaan Umum, Pembangunan Infrastruktur, Standar Pelayanan Minimal

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) in advancing Regulated under Government Regulation No. 2 of 2018, SPM serves as a guideline for local governments in planning, implementing, and evaluating infrastructure projects. The application of SPM in public works aims to ensure the quality and accessibility of public services while promoting transparency and accountability in project management. However, infrastructure development in Surabaya faces various challenges, including land acquisition, traffic congestion, suboptimal contractor performance, and environmental impacts. Supporting factors such as community participation, financial support, and clear government policies also play a vital role in the success of these projects. With effective implementation of SPM, infrastructure is expected to meet the basic needs of the community and support sustainable economic and social growth. Collaboration among the government, the public, and the private sector is essential to overcome existing challenges and ensure projects meet established standards.

Key words: Infrastructure Development, public works, "Standar Pelayanan Minimal", Surabaya City

PENDAHULUAN

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Terletak di wilayah Pantai Utara Jawa Timur. Secara Geografis, kota ini berada pada koordinat 7°9' hingga 7°21' lintang selatan dan 112°36' hingga 112°54'



bujur timur. Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, serta Kabupaten Gresik di barat. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki luas sekitar 335,93 km² dan terdiri dari 31 kecamatan serta 154 kelurahan. Kota ini juga merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di provinsi Jawa Timur, dengan populasi mencapai sekitar 3.009.286 jiwa pada tahun 2024. Sebagai kota bagian dari kawasan metropolitan yang lebih luas, jumlah penduduk dapat meningkat hingga 10 juta jiwa pada siang hari karena banyaknya pekerja dari daerah sekitarnya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas. Aturan ini menjadi acuan penyusunan dan penetapan bagi Kementerian/Lembaga pemerintah dalam menentukan Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan di setiap daerah (Kadir, 2023).

Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Maulana et al., 2021) dalam berbagai bidang, ini mencakup aspek-aspek penting seperti dibidang pekerjaan umum dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 138 Tahun 2023 juga menggaris bawahi Rencana Aksi Penerapan SPM di Kota Surabaya untuk tahun 2024-2025, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Di Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Agustina, Mahendradhata, 2023) dan SPM berperan strategis sebagai instrumen penting untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas layanan publik di bidang pekerjaan umum.

SPM menjadi landasan fundamental yang memberikan kerangka acuan bagi pemerintah daerah untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas layanan publik, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur. Dalam implementasinya, SPM berperan sebagai acuan bagi pemerintah kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai proyek infrastruktur. Melalui penetapan standar yang jelas dan terukur, SPM dibidang pekerjaan umum mampu mendorong terciptanya infrastruktur yang efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, memenuhi standar yang telah ditetapkan, tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kota Surabaya, dengan kompleksitas pembangunan perkotaannya, menghadapi berbagai tantangan infrastruktur, termasuk masalah kemacetan lalu lintas dan banjir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kota membutuhkan pendekatan sistematis dan terukur dalam mengembangkan infrastruktur. Melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah dapat merancang intervensi pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan responsif



terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Penerapan SPM yang efektif diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif, dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga pemerintah dapat lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target pembangunan.

Surabaya telah mengidentifikasi tantangan kompleks dalam proyek infrastruktur, termasuk integrasi transportasi dan adaptasi masyarakat terhadap transportasi publik. Selain itu, pemerintah kota berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang ditargetkan untuk mengatasi kemacetan dan banjir. Dengan menggunakan SPM, Pemkot Surabaya dapat memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat serta standar kualitas yang harus dipenuhi (Rismaharini, 2007).

Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan SPM di Kota Surabaya mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjawab tantangan yang ada dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dari semua elemen dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Dalam kesimpulannya, berdasarkan penjelasan diatas tentang peran Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di kota Surabaya, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran SPM bidang pekerjaan umum dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan studi pustaka. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai studi dan data yang tersedia, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang menyeluruh mengenai peran SPM bidang pekerjaan umum dalam pembangunan infrastruktur, termasuk faktor-faktor pendukungnya serta tantangan yang dihadapi dan dampaknya. Temuan dari artikel ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus memberikan saran bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

METODE

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menggali dan menganalisis data secara komprehensif, dengan fokus pada makna dan konteks dari informasi yang diperoleh. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan studi kepustakaan sebagai salah satu sumber data utama seperti artikel ilmiah, laporan pemerintah, buku, jurnal, serta dokumen terkait lainnya. Melalui kajian literatur yang relevan, dapat dikumpulkan informasi, teori, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data empiris, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan yang sudah ada untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai isu yang dibahas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran SPM bidang pekerjaan umum dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur.



Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pekerjaan umum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. SPM berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengelola proyek-proyek infrastruktur yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Aziza, 2016). Dengan adanya SPM, setiap proyek infrastruktur dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan standar tertentu yang menjamin kualitas dan keberlanjutan layanan.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang juga mencakup urusan wajib pemerintah daerah (Sarastri et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa SPM tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan dasar dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat.

Salah satu peran utama SPM adalah sebagai alat untuk menetapkan target yang jelas dalam pembangunan infrastruktur. Melalui SPM, pemerintah dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan, seperti perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan limbah. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif, sehingga proyek-proyek yang paling mendesak dan berdampak besar bagi masyarakat dapat diutamakan. Misalnya, dalam konteks Surabaya, proyek pembangunan saluran drainase untuk mengatasi masalah banjir menjadi prioritas utama yang sejalan dengan SPM.

Selain itu, SPM juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Dengan adanya standar yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah memantau perkembangan proyek dan mengevaluasi apakah hasil akhir memenuhi harapan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam konteks ini, Surabaya telah melibatkan masyarakat dalam berbagai forum konsultasi untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan infrastruktur.

SPM juga berperan dalam mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Dalam upaya memenuhi standar yang ditetapkan, pemerintah daerah dituntut untuk mencari solusi kreatif dan teknologi baru dalam pelaksanaan proyek infrastruktur (Londo & Suwetja, 2018). Hal ini dapat menciptakan peluang bagi pengembangan teknologi lokal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknik sipil dan manajemen proyek. Di Surabaya, penerapan teknologi smart city dalam pengelolaan infrastruktur merupakan contoh nyata dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

Secara keseluruhan, peran SPM dalam bidang pekerjaan umum di Kota Surabaya sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Dengan penerapan SPM yang baik, diharapkan kualitas hidup masyarakat Surabaya dapat meningkat secara signifikan melalui infrastruktur yang lebih baik dan berkelanjutan.

Faktor pendukung pembangunan infrastruktur.



Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat berbagai faktor pendukung yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur. Pertama, partisipasi masyarakat sangat penting ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek, mereka cenderung merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil pembangunan, yang pada gilirannya meningkatkan keberhasilan proyek tersebut (Sasmoro, 2017). Selain itu, dukungan finansial dari pemerintah dan lembaga lainnya juga menjadi faktor utama. Ketersediaan anggaran yang cukup memungkinkan pelaksanaan proyek infrastruktur secara efisien dan tepat waktu.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Kebijakan yang jelas dan terarah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan infrastruktur. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten juga merupakan aspek penting, tenaga kerja yang terampil dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek. Koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta juga sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur. Kerjasama yang harmonis dapat mengurangi konflik dan mempercepat proses pembangunan.

Di samping itu, keberadaan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi dan penyediaan energi, berfungsi sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur berkualitas tinggi tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan daya saing daerah. Terakhir, lingkungan sosial yang aman dan kondusif sangat berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, ketegangan sosial atau konflik dapat menghambat pelaksanaan proyek, sedangkan kondisi sosial yang stabil mendorong partisipasi masyarakat. Dengan memperhatikan semua faktor ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tantangan pembangunan infrastruktur di kota Surabaya.

Pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, yang memerlukan perhatian dan strategi yang tepat untuk diatasi. Salah satu tantangan utama adalah masalah pembebasan lahan. Banyak proyek infrastruktur terhambat karena adanya kendala dalam proses pembebasan lahan, yang sering kali melibatkan sengketa dengan pemilik tanah atau penolakan terhadap harga yang ditawarkan oleh pemerintah. Misalnya, proyek frontage road di Jalan Ahmad Yani dan Simpang Dukuh mengalami keterlambatan akibat belum selesainya proses konsinyasi untuk beberapa persil tanah.

Selanjutnya, kemacetan lalu lintas juga menjadi tantangan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan peningkatan jaringan jalan menyebabkan kemacetan yang parah, bahkan di luar jam sibuk (Saniyyah, 2019). Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperlebar jalan dan meningkatkan sistem manajemen lalu lintas, hasilnya masih belum optimal. Kemacetan ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat tetapi juga berdampak negatif pada pelaksanaan proyek infrastruktur, karena banyak proyek yang terhambat oleh kondisi lalu lintas yang padat.

Selain itu, kinerja kontraktor juga menjadi sorotan. Banyak proyek infrastruktur terhambat karena kontraktor tidak mematuhi jadwal kerja yang telah



disepakati dan sering meletakkan material proyek sembarangan, yang menyebabkan kemacetan¹. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan komitmen dari pihak kontraktor untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu kepentingan umum.

Di samping itu, masalah lingkungan juga harus diperhatikan. Pembangunan infrastruktur sering kali berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, tantangan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya mencakup masalah pembebasan lahan, kemacetan lalu lintas, kinerja kontraktor yang kurang optimal, serta dampak lingkungan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur kota.

Dampak SPM bidang pekerjaan umum terhadap pembangunan infrastruktur.

Dampak Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum terhadap pembangunan infrastruktur di kota Surabaya sangat signifikan, terutama dalam konteks penyediaan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. SPM merupakan pedoman mengenai jenis dan standar minimum layanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Dalam bidang pekerjaan umum, SPM mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penerapan SPM yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hilda et al., 2024).

Salah satu dampak positif dari penerapan SPM adalah peningkatan kualitas infrastruktur. Dengan adanya standar yang jelas, pemerintah kota dapat lebih fokus dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan infrastruktur antara kawasan perkotaan dan pinggiran kota, sehingga daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan. Misalnya, proyek perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum yang sesuai dengan SPM dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa ketika SPM diterapkan secara efektif, indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tersebut cenderung meningkat karena akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Rahman, 2024).

Namun, tantangan dalam penerapan SPM juga harus diperhatikan. Di Surabaya, salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang sering kali menghambat pelaksanaan proyek sesuai standar yang ditetapkan. Banyak proyek infrastruktur tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak memenuhi kualitas yang diharapkan karena kurangnya dana. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah juga menjadi masalah; tanpa sinergi yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya, pencapaian SPM bisa terhambat (Aziza, 2016).



Dengan infrastruktur yang berkualitas, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga meningkat, berpotensi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Surabaya. Dampak ekonomi positif juga terlihat, di mana infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek-proyek ini; infrastruktur yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan masalah seperti pencemaran atau banjir. Oleh karena itu, penerapan SPM perlu disertai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, SPM mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga masyarakat dapat menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, penerapan Standar Pelayanan Minimal di bidang pekerjaan umum memberikan manfaat jangka panjang yang penting bagi masyarakat dan perekonomian Kota Surabaya serta memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui SPM sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengatasi kendala-kendala yang ada serta memastikan bahwa semua proyek memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan

SIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menyoroti pentingnya peran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik. Meskipun terdapat tantangan seperti pembebasan lahan, kemacetan, dan kinerja kontraktor, penerapan SPM diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pinggiran serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, pelaksanaan SPM masih menghadapi kendala, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa proyek infrastruktur dapat memenuhi standar yang ditetapkan serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil kajian dalam artikel ini, pemerintah kota diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan masyarakat dan sektor swasta dalam perencanaan serta implementasi meningkatkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, optimalisasi alokasi anggaran, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Evaluasi berkala dan transparansi dalam pengelolaan proyek juga penting dilakukan untuk memastikan akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Surabaya



UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ilmiah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran dan dukungan, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.

Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada keluarga yang senantiasa memberikan doa dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga hasil karya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- (Kadir, 2023) SCIENTIA: *Journal of Multi Disciplinary Sciences Maluku Utara: Menegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Sciences*. 02(2), 72–83.
- (Savitri, 2013) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL : Perkembangan , Hambatan dan Tantangan Ke Depan. *DESENTRALISASI*, 11(32), 303–314.
- (Aulia, 2024) Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 36–54.
- (Awainah et al., 2024) Awainah, N., Aminullah, A., & Ekonomi, P. (2024). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 3, 2024 | 6847. 7, 6847–6854.
- (Rismaharini, 2007) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOTA SURABAYA, ANTARA ANTARA PROBLEM DAN SOLUSI. 978, 17–27.
- (Londo & Suwetja, 2018) Londo, I. P., & Suwetja, I. G. (2018). IPTEKS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. Irene P. Londo¹, I Gede Suwetja 2 1,2. *Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 02(02), 537–540.
- (Sarastri et al., 2023) Sarastri, L., Wardoyo, P., Studi, P., Manajemen, M., Semarang, U., & Sektoral, K. L. (2023). STRATEGI MENINGKATKAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(4), 379–389.
- (Aziza, 2016) Aziza. (2016). *Evaluasi standar pelayanan minimal (spm) pekerjaan umum dan penataan ruang kota samarinda : sebuah upaya menuju perbaikan* 1. 12(3), 259–278.
- (Rahman, 2024) Analisis Pengaruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kesejahteraan Masyarakat Di Kalimantan Tengah. 2(3).
- (Hilda et al., 2024) Hilda, D., Herlina, D., Risma, J., Hikmat, S., & Almubaroq, Z. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terhadap Pembangunan Manusia Indonesia Dalam Mendukung Pertahanan Negara. 3(2), 1727–1741.



- (Saniyyah, 2019) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN PEMKOT SURABAYA MASA. *E-Journal Pendidikan Sejarah*, 7(1).
- (Sasmito, 2017) Implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 72–76.
- (Agustina, Mahendradhata, 2023) Agustina, Mahendradhata, dan P. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Magelang. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI VOLUME*, 12(02), 109–113.
- (Maulana et al., 2021) Maulana, I., Anshori, S., Magister, S., Inovasi, M., & Teknologi, U. (2021). *Implementasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal*. 277–285.